

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Penelitian Terdahulu

NO	PENE LITI	JUDUL SKRIPSI	METOD OLOGI	TEORI & KONSEP	HASIL PENELITIAN
1	Katreda Ludia Welmina Tarobi	“Evektivitas Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dalam ranka peningkatan kessejahteraan Masyarakat di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura”	Kualitatif	Otonomi daerah dan terori elit	Menurut Katreda; poin penting dari pelaksanaan Kebijakan Otsus di Jayapura sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperhatikan Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Ekonomi dan Aspek Pemberdayaan Orang asi Papua
2	Ciputra Lha	“Evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus di distrik Kayuni Kabupaten Fak – Fak Provinsi Papua Barat”	Kualitatif	Evaluasi dan pendidikan peranan.	Persoalan Pendidikan di Papua sangat memprihatinkan sebab pendidikan di Papua hanya di nikmati oleh kelompok – kelompok yang tinggal di perkotaan, sedangkan kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman tidak memperoleh akses pendidikan.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

Bahwasanya dalam melakukan suatu kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat, ada asa suatu tolak ukur atau indikator yang menggambarkan bahwa suatu kebijakan yang di keluarkan serta di lakukan di katakan dapat memberikan suatu manfaat yang sebesar – besarnya kepada masyarakat atau dapat di katakan bahwa tetat sasaran. Oleh karena itu, menurut penelitian yang di lakukan oleh **Katreda Ludia Welmina Tarobi**, dengan

judul *Evektivitas Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dalam ranka peningkatan kessejahteraan Masyarakat di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dengan konsep dan teori Otonomi daerah dan terori elit. Oleh karena itu, menurut Katreda ada empat indikator yang dapat menentukan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua khususnya di distrik Jayapura Utara diantaranya :

Pendidikan Perkembangan sosial ekonomi suatu bangsa akan berlangsung lebih baik apabila peningkatan taraf hidup didukung oleh pembangunan sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk menuju kepada pengembangan sumber daya manusia yang unggul adalah dengan meningkatkan kuliats pendidikan yang layak baik infrastruktur pendidikan maupun supra struktur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, namum apabila pendidikan hanya mampu mengakomodir mereka yang memiliki pendapatan perkapita yang meningkat. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan pemerintah wajib mendidik anak bangsa sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa.jika dilihat dari dana Otonmi Khusus yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan sebesar 30%, namun kondisi pendidikan di Papua menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Papua sangat jauh dari yang diharapkan

Yang kedua adalah *kesehatan* Dari aspek kesehatanpun menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan, tolak ukur untuk menilai bahwa dana otsus telah dilakukan untuk pengembangan rumah berobat bukan sesuatu yang memprihatinkan walaupun itu merupakan salah satu unsur pendukung kesehatan. Namun yang dilihat adalah angka Gizi buruk yang dialami masyarakt jmerupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang penuh

bagi pemerintah daerah dengan pemanfaatan dana Otonomi Khusus dengan maksimal. Karena kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor *ekonomi*, Salah satu pemicu konflik di Papua antara orang asli Papua dengan pendatang hingga saat ini adalah penguasaan dan kepemilikan atas modal dan alat produksi yang memadai. Sehingga, jika rakyat Papua tidak diberdayakan dengan pemanfaatan dana Otonomi Khusus dengan baik – baik, tentu hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Dan yang ke empat adalah *Pemberdayaan Orang Asli Papua* Pemberdayaan rakyat Papua, yang dimaksud disini adalah, pembuatan regulasi atau perdasus tentang rekrutmen baik dalam bidang pemerintahan, politik, maupun ekonomi. Angka kesejahteraanpun dilihat dengan pemberdayaan rakyat dalam bidang – bidang yang dapat mendorong kesejahteraan. Dari hasil penelitiannya, Ketreda memperoleh kesimpulan bahwa Kewenangan implementasi Otsus tidak di berikan secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan Masyarakat menjadi tidak berjalan semestinya di karenakan pemerintah pusat melalui BPK tidak bekerja secara totalitas dalam proses pemeriksaan terhadap elit di daerah dan program pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat asli Papua tidak tepat sasaran, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi khusus masih minim.¹

Sedangkan Menurut **Ciputra Lha** dengan judul penelitian *Evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus di distrik Kayuni Kabupaten Fak – Fak Provinsi Papua Barat* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam pengembangan kualitas Pendidikan dengan menggunakan konsep dan teori Evaluasi dan pendidikan peranan. Menurut Ciputra, Birokrat dalam mengimplementasikan

¹ Ketreda Ludia Torob, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik jayapura Utara Kota Jayapura, *Jurnal Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi* Vol.3. Manado 2014

otonomi khusus masih jauh dari yang diharapkan, bahwa peranan birokrasi pemerintahan pada penerapan Otsus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan sangat diperlukan, Ciputra juga mengatakan bahwa bukan hanya pendidikan saja, namun dalam sektor lainpun perlu diperhatikan dalam rangka implementasi kebijakan otsus seperti membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta hal lain yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Persoalan pendidikan di Papua jika diamati secara seksama, pendidikan yang ada memang masih memprihatinkan, meskipun Papua sudah dibantu oleh pemerintah pusat dengan anggaran yang tidak sedikit, pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka yang berdomesili di perkotaan, sedangkan daerah – daerah jauh dari pusat perkotaan seperti yang terjadi di kecamatan Kayuni masih banyak yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Jika dilihat terjadi kualitas pendidikan yang sangat berbeda jauh dari sisi fasilitas pendidikan baik infrastruktur sekolah, tenaga pengajar, hingga media pembelajaran yang dipakai²

3.2. Hasil Penelitian

Salah satu tujuan di berikannya kewenangan kepada daerah untuk mengelolah daerahnya sesuai dengan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal sesuai dengan amanat UU Otsus Pasal 38 ayat (2) bahwa “ Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.”

² Ciputra Iha, “Evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus di distrik Kayuni Kabupaten Fak – Fak Provinsi Papua Barat” *Jurnal artikel Politik* 2017.

Untuk mewujudkan masyarakat Papua yang adil dan beradab bukan hanya di lihat dari sektor infrastruktur yang begitu berkembang pesat di era kepemimpinan presiden Jokowi, persoalan politik, seperti pemekaran wilayah atau demokratisasi seperti yang di lakukan oleh pemerintahan Aburahman Wahid dan BJ Habbie, yang terpenting sebagai garda terdepan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat asli Papua adalah faktor ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan mengandung pengertian bahwa faktor – faktor produksi yang penting bagi suatu daerah atau negara, perlu untuk masyarakat yang menjadi motor utama penggerakan perekonomian daerah untuk menunjang perekonomian nasional. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian yang mampu di kelolah oleh masyarakat lokal secara swadaya.

Untuk menunjang ekonomi kerakyatan yang ada Kabupaten Manokwari sebagai wajah Ibu Kota Provinsi, infrastruktur dan supra struktur perekonomian penting untuk di sediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua melalui sektor perdagangan.

Sebagai upaya untuk membangun ekonomi yang berbasis pada rakyat melalui sektor perdagangan di Pasar Wosi, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari telah melakukan terobosan baru dalam melaksanakan pembagian lapak di pasar Wosi kepada seluruh pedagang Papua yang ada di Kabupaten Manokwari. walaupun terobosan ini belum maksimal di jalankan oleh pedagang – pedagan asli Papua karena praktik – praktik kecurangan yang di lakukan oleh oknum – oknum tertentu yang menggadaikan lapak kepada orang lain dengan mematok harga yang tinggi.

Peraturan Daerah Khusus yang di terbitkan oleh Bupati Manokwari sebelumnya yaitu Paulus Demas Mandacan dengan membangun pasar khusus Mama – Mama Papua di Pasar Wosi, sebagai salah satu cara untuk pemamfaatan sumber daya alam yang selama bertahun – tahun menjadi sumber utama pencaharian masyarakat asli Papua di Kabupaten

Manokwari. Sebagai lembaga eksekutif, Pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap beberapa oknum yang telah terlibat dalam upaya jual beli lapak di Pasar Wosi, seperti yang di kutip dari laman Papua Barat News ; salah satu pedagang yang bernama H.Azis Laiutung kepada La Yudi dengan harga Rp 210 Juta.

Hal itu di lakukan guna memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, dengan retap menjunjung tinggi rasa keadilan, pemeraraan, perlindungan terhadap masyarakat adar, perempuan, Pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah hal yang ,"mendasar untuk di lakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli Papua. Hingga tahun 2022 pasca kebakaran yang terjadi di pasar wasi pada bulan Mei Lalu, berapa upaya telah di lakukan oleh pemerintah daerah Manokwari untuk merelokasi berberapa pedagang yang terkena dampak dari kebakaran serta pedagang – pedagan lain yang tidak memiliki ijin bangunan di sekitar pasar wosi untuk segera menertibkan diri demi kepentingan besama. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari perlu memperoieh prioritas dalam pembangunan ekonomi di Provinsi papua. Mengingat sektor Ekonomi kerakyatan dapat menjadi pelaku utama daiam mengangkat harkat dan martabat orang Papua melalui sektor perdagangan terutama dengan pengalaman masa krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional dewasa akibata Covid -19 berdampak bagi pendapatan masyarakat Papua di Manokwari.

3.3. Teori Konflik Clifford Gertz

Konflik selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah dunia bahkan sejarah peradaban. Selama manusia masih hidup, tidak mungkin manusia menghapus konflik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan individu bahkan konflik negara, bahkan konflik antar pemeluk agama dan konflik antar negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan manusia.

Pada dasarnya konflik di timbulkan oleh berbagai macam perbedaan selera, perbedaan pendapat, serta perbedaan kepentingan. Salah satu ilmuwan yang menyelidiki tentang sejarah lahirnya negara adalah Thomas Hobbes dalam teorinya tentang perjanjian masyarakat (Kontrak Sosial) berpendapat bahwa kehidupan manusia pada sejatinya adalah kehidupan yang kacau balau dan saling menaklukan.

Dikatakan olehnya, keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara, di analogikan sebagai serigala bagi sesamanya. Hal itu, di tambahkan oleh Solly Lubis bahwa menyangkut keadaan manusia sebelum terbentuknya negara sebagai suatu suasana kehidupan yang tidak tenang karena manusia dipengaruhi oleh egoismenya yang tidak bisa dibatasi³

Walaupun konflik merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia dalam lingkungan sosial dan kata konflik sering terdengar dalam lingkungan masyarakat, namun menyangkut kepentingan konflik, tidak terlalu banyak orang memahaminya. Der ean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin' mengangkat pendapat Webster bahwa istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa kelompok dan individu. Oleh karena itu, pengertian ini mengalam

³ Krinus Kum. *Konflik pemakaran wilayah di Papua*. Buku Litera Yogyakarta 2013. Hal.15

perkembangan sehingga menyentuh ke aspek psikologi sehingga konflik berarti persepsi mengenai kepentingan.

Secara singkat Teori Konflik di artikan sebagai suatu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai – nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi – kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada kepemilikan sarana – sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.⁴

Clifford Gertz menyatakan bahwa konflik politik disebabkan oleh ikatan primordialisme yang mengalami percampuran antara kesetiaan politik dan kesetiaan primordial atau etnisitas. Sebuah ikatan primordial dapat membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial melahirkan fanatisme yang kuat kepada kelompok. Fanatisme ini dapat memperkokoh integrasi dalam suatu komunitas atau kelompok, namun di sisi lain, fanatisme juga mempermudah terjadinya gesekan dalam lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat menjadi penguang bagi kaum nasionalisme dalam upaya untuk memperoleh legitimasi dalam lingkungan masyarakat.

Namun sikap fanatisme bersifat tidak kekal, seharusnya fanatisme ini didasarkan pada kualitas pengabdianya kepada masyarakat. Misalnya, fanatisme terhadap partai politik, apabila fanatisme terhadap suatu partai politik bercampur dengan primordialisme, maka fanatisme tersebut akan sangat susah untuk diubah. Hal ini akan berdampak terhadap sulitnya pengawasan terhadap seseorang yang berkuasa, meskipun perilakunya buruk (menyimpang dari konstitusi) tetap saja di anggab baik oleh pengikutnya.

⁴ *Ibid*.hal.18

Primordialisme merupakan paham atau ide ataupun gagasan dari anggota masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok sehingga terbentuklah suku – suku bangsa, pengelompokan itu, tidak hanya membentuk suku bangsa saja, namun juga dalam bidang lain seperti ideologi, agama dan kepercayaan. Primordialisme oleh sosiolog digunakan untuk menggambarkan adanya ikatan – ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan aspek – aspek lain yang dibawa sejak lahir.

Metode yang dikembangkan Mills adalah menggabungkan antara pendekatan konflik dengan kritik yang keras terhadap keteraturan sosial di Amerika. Menurutnya dengan dasar pengetahuan yang ada, akan menjadi mungkin untuk merancang masyarakat yang baik dan bermoral bahkan sebaliknya, dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang bisa menciptakan konflik antara masyarakat.

Penderitaan material dari pekerjaan di masa lalu, sesungguhnya telah digantikan oleh rasa tidak nyaman secara psikologis pada masa kini, saat para pekerja mengalami alienasi atas dirinya dan atas apa yang ia perbuat. Keras – keras putihpun menjadi apatis, ketakutan karena harus di tempah oleh budaya masa. Struktur masyarakat menciptakan alienasi, persoalan kepribadian dan manipulasi yang disebabkan media massa. Mills menyatakan :“ Mereka yang mempertahankan kekuasaan seringkali melatihnya dalam cara – cara tersembunyi.

Mereka telah bergerak dan bergerak dari otoritas menuju manipulasi sistem rasionalitas yang menyembunyikan kekuasaan mereka yang tidak ada seorangpun yang melihat sumber – sumber otoritasnya atau memahami perhitungannya. Bagi birokrasi dunia adalah objek manipulasi. Secara lebih khusus, dalam *White collar The Amerika Middle Classes*, Mills mengkritik kelas menengah baru, termasuk anggotanya, pekerja juru tulis, sales meneger, dan kaum profesional yang birokratis. Mills melihat orang – orang tersebut sebagai penggerak yang tidak memiliki kekuasaan dalam mesin – mesin birokrasi.

Mereka kehilangan individualitas atau pendirian. Alienasi dalam pekerjaan menciptakan manusia – manusia yang berjalan riuh saat waktu luang. Mereka hidup dalam industri pertunjukan yang memproduksi kesenangan palsu secara intensif, menawarkan pengambilan yang tidak ril, dan berkembang dalam nilai – nilai yang umum. Gagasan Mils yang menarik adalah tentang elit – elit pengatur di masyarakat. Elit yang di maksud adalah kelompok kecil yang secara rutin berinteraksi dan memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dalam masyarakat mereka menjadi kelompok yang berkuasa, karena anggota – anggotanya memiliki posisi kunci institusional yang bisa memerintah otoritas yang besar, sumber – sumber khusus dan sektor – sektor penting, masing – masing sektor bergantung dengan sektor – sektor lainnya.

Mils memperjelas penggambaran kekuasaan elit ini dalam bentuk piramida kekuasaan. Bagian paling puncak piramida di duduki oleh elit berkuasa, yakni pemimpin yang menguasai tiga sektor hierarkis, yakni kekayaan perusahaan, orang – orang yang paling kaya, dan pemilik saham perusahaan – perusahaan besar (Pemimpin eksekutif, legislatif yudikatif) dan kemudian pejabat yang memiliki kedudukan di militer.

Kemudian lapisan kedua adalah pemimpin opini lokal, cabang legislatif pemerintah, dan beragam kelompok kepentingan. Bangunan ini melakukan tawar menawar bagi elit – elit berkuasa. Dan kemudian lapis ketiga adalah masa yang tidak memiliki kekuasaan dan orang – orang yang tidak terorganisasi yang di kontrol oleh kekuasaan – kekuasaan yang di atas, baik secara ekonomi maupun politik. Lapisan ketiga ini di eksploitasi oleh lapisan – lapisan di atasnya.

Menurut Mils ada dua faktor yang menyebabkan kemunculan kekuasaan elit. *Pertama*, alat kekuasaan dan kekerasan yang saat ini jauh lebih besar dari pada yang masa lalu. *Kedua*, sifat saling tergantung di antara elit yang merupakan hasil dari faktor struktur sosial yang dapat di lihat secara historis dimana bentuk dan derajat sentralisasi institusi ekonomi,

militer dan politiknya sangat besar. Selain itu, elit juga di katakan sebagai unit kesadaran diri secara kohesif. Kesatuan ini di dasarkan pada tiga faktor yaitu *Kesamaan Psikologis, Interaksi sosial dan kesamaan kepentingan*.

Kesamaan interaksi jelas akan mengantari mereka sebab sebagai *rulling group*, mereka terlibat dalam seperangkat kelompok yang bersifat tumpang tindih dan klik – klik yang berhubungan secara berbelit – belit. Orang dalam lingkaran paling tinggi juga di pahami sebagai lapisan anggota dari lapisan sosial yang paling atas, sebagai kerangka kelompok yang memiliki anggota tahu satu sama lain mereka membentuk satu kesatuan sosial dan psikologi yang rapi.

Bersamaan dengan kesamaan kepentingan, maka kepentingan yang sama tersebut memelihara sistem kaitalis yang menjadi puncaknya adalah mereka. Pemerintah membutuhkan sistem pertahanan yang memadai dan itu di setuju oleh miiter, sedangkan berbagai korporasi dengan senang hati berdagang menanggung keuntungan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan demi kepentingan orang – orang yang memililki kesamaan kepentingan tadi. Kepentingan – kepentingan yang sama ini menghasilkan sebuah kesatuan dan kebutuhan untuk sebuah perencanaan dan koordinasi langkah – langkah mereka, ketika masing – masing sektor mempengaruhi sektor lain dalam sautu wilayah negara.⁵

Berdasarkan teori konflik di atas, dapat di lihat bahwa konflik yang terjadi di tanah Papua pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat secara khususnya adalah konflik yang di sebabkan oleh sikap fanatisme yang di junjung tinggi oleh suatu kelompok yang ada di Kabupaten Manokwari. Secara umum konflik yang terjadi di Kabupaten Manokwari antara orang asli Papua dan orang pendatang di sebabkan oleh sejarah masa lalu yang hingga kini masih menjadi trauma dan sudah menjadi dogma terhdapa etnis kulit putih. Masyarakat Papua

⁵ *Ibid* 22 - 25

pada umumnya tak terkecuali di Manokwari melihat bahwa dengan adanya keberadaan bangsa kulit putih di Papua merupakan salah satu model penjajahan baru yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua.

Pada dasarnya konflik di timbulkan oleh berbagai macam perbedaan selera, perbedaan pendapat, serta perbedaan kepentingan. Hal ini sejalan dengan Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam etnisitas. Etnis yang ada di Indonesia memiliki identitas masing – masing yang tentunya berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia bisa memicu suatu konflik yang berkepanjangan, baik konflik politik, konflik sosial dan budaya maupun konflik ekonomi. Seperti yang terjadi di Manokwari, hingga kini menjadi Ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari dan Sorong merupakan dua kabupaten di Provinsi Papua Barat yang sudah mengalami percampuran budaya. Dalam konteks konflik ekonomi, perbedaan dapat di lihat dari cara produksi. Di Manokwari bisa di lihat di pinggiran – pinggiran Kabupaten Manokwari seperti (Prafi, Masni, hingga ke Kebar) di sepanjang jalan bisa dapat terlihat kebun padi yang terhampar luas hingga puluhan ribu hektar tanah.

Sedangkan di sebelah jalan dapat di lihat perkebunan – perkebunan kelapa sawit dan coklat yang juga di miliki oleh perusahaan – perusahaan yang mayoritas pemiliknya adalah warga pendatang. Sedangkan di bagian bawah gunung, dapat terlihat perkebunan – perkebunan sederhana yang di miliki oleh orang Papua yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sebagian di jual di pasar jika hasil panenya lebih. Perbedaan dalam corak produksi ini juga yang menjadi sumber konflik antara orang asli Papua dan warga pendatang di Kabupaten Manokwari. Masih dalam konteks ekonomi, di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Manokwari, banyak di temukan di pinggir jalan, di emperan toko dan di depan rumah, masih banyak orang asli Papua yang masih berjualan dengan berlasakan kain dan karung. Walaupun pemerintah daerah sudah menyediakan tempat, namun tidak dapat di kelolah dengan baik oleh mama – mama Papua.

Begitupun dalam perbedaan kepentingan, mayoritas dari orang Papua menjadikan pasar sebagai suatu tempat untuk menjual hasil buminya dengan harga yang sangat murah sedangkan orang pendatang menjual barang – barang yang di beli dari mama – mama Papua untuk menjualnya lagi dengan harga yang mahal seperti mereka yang membuka usaha warung makan cepat saji, atau swalayan, dan toko – toko sayur atau buah yang ada di kota Manokwari. Dari sini dapat di lihat bahwa, orang Papua terkhususnya mama – mama di pasar menjual hasil kebunnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, sedangkan warga pendatang membeli dan menjual untuk akumulasi kapital atau modal.

Corak – corak produksi tersebut akhirnya menghadirkan hubungan produksi baik antara sesama etnis yang memiliki budaya sama maupun etnis lain yang memiliki budaya yang berbeda, dalam konteks yang pertama, corak yang sama akhirnya membentuk suatu komunitas dalam lingkungan masyarakat Papua. Hubungan – hubungan yang di bangun melalui kedekatan primordialis antara warga pendatang di Kabupaten Manokwari akhirnya melahirkan suatu elit yang bertanggung jawab terhadap warga pendatang di Kabupaten Manokwari, baik elit politik maupun elit ekonomi, elit ekonomi yang selama ini tinggal dan menetap di Kabupaten Manokwari yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang ada di sistem pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten hingga desa.

Begitupun hubungan sosial yang terjadi antar sesama etnis Papua di Kabupaten Manokwari, corak – corak produksi yang sama ini akhirnya menghadirkan suatu kelompok dalam lingkungan sosial yang ada di Papua, kesamaan etnis dan budaya ini yang kemudian melahirkan fanatisme kesukuan, fanatisme kesukuan ini yang kemudian memicu konflik yang ada di Kabupaten Manokwari. Karena berangkat dari kepentingan yang berbeda tadi, mayoritas Papua yang menjual di pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, mereka tidak mampu untuk melahirkan suatu elit yang betul – betul bertanggung jawab terhadap kepentingan orang asli Papua, walaupun ada, namun yang menjadi prioritas bukan kepentingan untuk suatu

kelompok etnisitas, namun prioritas bersama akan dipertimbangkan. Hal ini yang mengakibatkan kenapa mayoritas masyarakat Papua tidak lagi mempercayai elit – elit politik lokal yang ada di Papua, terkhususnya kabupaten Manokwari.

Oleh karena itu dalam konteks di atas, secara singkat Teori Konflik diartikan sebagai suatu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai – nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi – kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada kepemilikan sarana – sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.⁶

Seperti yang dikatakan oleh Clifford Gertz menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Pasar Wosi disebabkan oleh ikatan primordialisme yang mengalami percampuran antara kesetiaan politik dan kesetiaan primordial atau etnisitas. Sebuah ikatan primordial dapat membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial melahirkan fanatisme yang kuat kepada kelompok. Fanatisme ini dapat memperkokoh integrasi dalam suatu komunitas atau kelompok, namun di sisi lain, fanatisme juga mempermudah terjadinya gesekan dalam lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat menjadi penguang bagi kaum nasionalisme dalam upaya untuk memperoleh legitimasi dalam lingkungan masyarakat.

3.4. Teori Elit politik Suzanne Kaller

Menurut Suzanne Kaller elit pada umumnya tidak bersifat tunggal, elit merupakan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang massa masing – masing. Elit – elit yang menonjol ini merupakan minoritas kecil yang terorganisasi rapi dan terstruktur dan masyarakat di anggap bisa dapat di atur secara maksimal di sebabkan karena sifat yang mayoritas dan

⁶ *Ibid.* hal.18

apatis. Pihak – pihak yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang kemudian di sebut sebagai “ Elit Strategis “. Elit sebagai penguasa juga dapat melakukan monopoli kekuasaan yang akan memudahkan tujuan – tujuan baik bagi masyarakat yang di pimpinya seperti menyejahterakan rakyatnya, peningkatan mutu pendidikan, perluasan sektor lapangan kerja tetapi dapat juga di gunakan untuk hal – hal yang bersifat negatif seperti mencari keuntungan sendiri dan untuk kepentingan individu dan kelompok.⁷

Dinamika elit dalam konteks sebuah organisasi sosial keagamaan dan kerangka sistem politik merupakan kelompok kepentingan (Interest Group) yang terlibat proses fungsi input. Intensitas kelompok ini dalam melakukan input tergantung oleh dinamika internal dan kekuatan moral yang menggerakkan aktivitas dan perubahan kelompok tersebut⁸. Dinamika dalam elit lokal sangat di pengaruhi oleh adanya konstruk dan pola kehidupan suatu kelompok. Hal ini di sebabkan karena kelompok sosial di masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Sesring kali terjadi karean adanya suatu kepentingan individu dalam suatu tujuan kelompok mengakibatkan persaingan internal kelompok tersebut. Dari pandangan eksternal anrara kepentingan kelompok satu dan lainnya menciptakan suatu persaingan yang tidak jarang menimbulkan konflik. Kelompok ataupun pengaruh individu inilah yang merupakan elit yang menciptakan dinamika dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi budaya.

Sejatinya studi yang berkaitan dengan elit lokal telah di lakukan oleh beberapa kalangan, antara lain di lakukan oleh Abdur Rozeki (2004) dan Abdul hamid (2006). Studi tersebut memfokuskan pada peran yang di lakukan oleh elit lokal dengan masyarakat dan hubungan *Patronoge* yang tercipta dalam kaitanya antara elit dengan massa. Studi tersebut juga

⁷ Suzann Kaler, “Penguasa dan kelompok elit”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995 , *Jurnal Politik Muda*, Vol.4., Januari 2014. Hal.41

⁸ Hilmy Monther, *Demokrasi dan politik di kota santri*, Malang UB Press, 2011, 144-145

menunjukkan hadirnya kekuasaan oligarkhis yang terbangun pada diri elit lokal yang sedemikian kokoh sehingga sulit untuk di kontrol oleh masa.

Menyusul tumbangya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998, sistem politik mengalami perubahan dan era reformasi memberikan peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Proses demokratisasi yang salah satunya terejawantahkan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah membawa dampak yang mengguncang keberadaan dan peran elit politik lokal yang telah mapan sepanjang sejarah rezim Orde Baru berkuasa. Di era demokratisasi dan desentralisasi untuk merebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu – individu yang mengincar posisi tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran negara sedemikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah.

Pada era otoritarian Orde Baru elit politik lokal lebih sering memainkan peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Elit politik lokal cenderung melakukan peran sebagai perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat untuk mengeksploitasi masyarakat (Antlov, 1994:73). Untuk mewujudkan kepentingan tersebut negara sangat berkepentingan dalam hal memilih dan menentukan peran yang di emban oleh elit politik lokal.⁹

Keadaan tersebut di atas mengindikasikan bahwa sepanjang rezim Orde Baru mengendalikan roda pemerintahan, keberadaan dan peran elit politik lokal lebih banyak di topang dan tergantung pada negara. Hal ini dapat berlangsung karena negara yang direpresntasikan oleh pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Biasanya kekuasaan tersebut salah satunya di tandai dengan kuat dan dominanya peran pemerintah pusat

⁹ Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik" *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 2, November 2009, Hal.33*

menjadikan segala urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, menarik untuk mencermati keberadaan dan peran elit politik lokal. Tumbangya rezim Orde Baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan peranya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah. Melemahnya peran negara yang di ikuti dengan berkembagnya situasi kondusif bagi demokratisasi, menjadikan elit politik berupaya secara mandiri untuk tetap dapat berdiri. Para elit politik lokal harus mampu membangun pijakan baru sebagai basis kekuasaanya untuk menopang posisinya, hal ini karena mereka tidak mungkin lagi menyandarkan diri pada negara yang semakin lemah kontrolnya.

Dalam hal ini, konsep strkturisasi yang di kemukakan oleh Anthony Gidens dapat di pergunakan sebagai acuan yang melandasi analisis terhadap pasang naik dan pasang surutnya elit politik lokal. Konsep tersebut di pinjam untuk menjelaskan hubungan antara elit politik lokal yang di posisikan sebagai pelaku dengan strukur yang di konseptualisasikan sebagai aturan dan sumber daya. Sruktur yang di nyatakan oleh Giddens selain dapat membatasi atau mengekang, dapat pula memberdayakan pelaku. Pembatasan ataupun pemberdayaan struktur tersebut dapat di lakukan oleh negara karena kewenangan yang melekat pada dirinya.¹⁰

Sebagai mana di ungkapkan dalam teori struktrisasi, Gidden menyatakan bahwa ada hubungan antara pelaku dan struktural, dimana hubungan antara keduanya berupa relasi dualitas. Dalam hubungan dualitas, bukan dualisme, termaktub pengetahuan bahwa antara pelaku dan struktur tidak terpisahkan, di antara keduanya terjadi hubungan saling mempengaruhi. Hubungan antara pelaku dengan struktur dapat di pahami melalui praktik

¹⁰ *Ibid*,Hal.135

sosial; dimana praktik sosial itu sendiri merupakan kejadian atau kebiasaan sehari – hari hasil interaksi antara struktur dengan pelaku. Hubungan tersebut di pengaruhi kesadaran praktis (*Practisal Conciuousnes*) dan kesadaran diskursif (*Discursife Conciuousnes*) dari pelaku. Melalui kesadaran praktis pelaku, struktur dapat memenjarakan atau membatasi pelaku dengan cara memaksa untuk melaksanakan rutinisasi tindakan (sebagai kebiasaan sehari – hari). Sebaliknya kesadaran diskursif yang di milikinya, pelaku berupaya merubah struktur melalui praktik sosial baru dengan melakukan de-rutinisasi tindakan.

Giddens menyatakan bahwa struktur merupakan aturan (*Rules*) dan sumber daya (*Resources*) dapat di bentuk dari dan membentuk peluang praktik sosial yang di pahami sebagai faktor yang tidak bersifat membatasi atau mengekang tetapi juga bersifat memberdayakan pelaku. Namun pada sisi yang lain, pelaku yang merupakan aktor dapat pula mempengaruhi struktur, dalam arti tindakan harus selalu tunduk kepada struktur.

Lebih lanjut Giddens menyebutkan bahwa ada tiga gugus struktur, yakni signifikasi (*Signification*), Dominasi (*Domination*) dan Legitimasi (*Legitimation*). Struktur signifikasi merujuk pada pemaknaan atau simbolik, penyebutan, dan wacana. Gugus struktur dominasi merujuk kepada penguasaan baik atas orang maupun barang. Sedangkan gugus struktur legitimasi merujuk pada peraturan normatif yang tampak pada aturan hukum. Ketiga gugus struktur tersebut selain dapat membatasi, dapat pula memberdayakan pelaku.¹¹

Dalam konteks Pasar Wosi Kabupaten Manokwari, sebagai mana di ungkapkan dalam teori struktrisasi, hubungan antara pedagang di pasar dan struktural yang ada di sistem pemerintah , dimana hubungan antara keduanya berupa relasi dualitas yang lahir dari sebuah konflik. bahwa antara pelaku pedagang di pasar wosi baik orang asli Papua maupun warga pendatang di Kabupaten Manokwari tidak terpisahkan, di antara keduanya terjadi hubungan

¹¹ *Ibid*,Hal.136

saling mempengaruhi. Hubungan antara elit politik yang mewakili pendatang pedagang warga pendatang di pasar wosi dengan struktur pemerintahan.

Kabupaten Manokwari dapat di pahami melalui praktik sosial yang sudah di jelaskan di dalam teori konflik di atas; dimana praktik sosial dan realasi serta hubungan sosial yang di bangun baik oleh orang asli Papua maupun warga pendatang di Kabupaten Manokwari sendiri merupakan kejadian atau kebiasaan sehari – hari hasil interaksi antara alit lokal baik yang memiliki kewenangan untuk mengelolah pasar, maupun dengan elit lokal dalam struktur dan jajaran pemerintahan.

Hubungan tersebut di pengaruhi kesadaran praktis (*Practisal Conciousnes*) dan kesadaran diskursif (*Discursife Conciousnes*) dari pelaku. Melalui kesadaran praktis pelaku, struktur dapat memenjarakan atau membatasi pelaku dengan cara memaksa untuk melaksanakan rutinisasi tindakan (sebagai kebiasaan sehari – hari). Sebaliknya kesadaran diskursif yang di miliknya, pelaku berupaya merubah struktur melalui praktik sosial baru dengan melakukan de-rutinisasi tindakan.

Giddens menyatakan bahwa struktur merupakan aturan (*Rules*) dan sumber daya (*Resources*) dapat di bentuk dari dan membentuk peluang praktik sosial yang di pahami sebagai faktor yang tidak bersifat membatasi atau mengekang tetapi juga bersifat memberdayakan pelaku. Namun pada sisi yang lain, pelaku yang merupakan aktor dapat pula mempengaruhi struktur, dalam arti tindakan harus selalu tunduk kepada struktur.

Lebih lanjut Giddens menyebutkan bahwa ada tiga gugus struktur, yakni signifikasi (*Signification*), Dominasi (*Domination*) dan Legitimasi (*Legitimation*). Struktur signifikasi merujuk pada pemaknaan atau simbolik, penyebutan, dan wacana. Gugus struktur dominasi merujuk kepada penguasaan baik atas orang maupun barang. Sedangkan gugus

struktur legitimasi merujuk pada peraturan normatif yang tampak pada aturan hukum. Ketiga gugus struktur tersebut selain dapat membatasi, dapat pula memberdayakan pelaku.

Berdasarkan teori strukturasi tersebut dapat di lihat dengan jelas di pasar Wosi, dimana gugus struktur signifikasi menjadi penting bagi orang Papua untuk mempertahankan hak dan identitasnya sebagai orang Papua di Kabupaten Manokwari melalui simbol sebagai bangsa yang rambut kriting dan kulit hitam atau dengan penyebutan Orang Asli Papua (OAP) serta wacana orang asli Papua untuk menguasai sektor perekonomian di pasar wosi melalui kebijakan pemerintah daerah dan sebagainya, hal tersebutpun terjadi terhadap warga pendatang di kabupaten Manokwari jika berkaca pada gugus struktur signifikasi. Namun pada prakteknya, yang mendominasi pasar wosi dan beberapa pusat perbelanjaan yang ada di kota Manokwari adalah warga pendatang dengan mendirikan ruko, rumah makan cepat saji, supermarket dan lain – lain.

Dalam konteks gugus struktur legitimasi sangat terlihat dengan jelas di pasar Wosi, bahwasanya warga masyarakat pendatang di kabupaten Manokwari memperoleh legitimasi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pencatatan sipil. Karena dalam konteks elit politik, elit politik lokal di kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua barat juga memperoleh legitimasi dari warga pendatang di Kabupaten Manokwari dengan ikut memilih elit – elit elit politik lokal yang di harapkan dapat melindungi kepentingan mereka dalam bentuk terobosan suatu aturan dan kebijakan yang dapat memihak kepada mereka , tiga gugus struktur ini dapat di praktekan oleh setiap kelompok yang ada di Kabupaten Manokwari.

3.5. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Reformasi birokrasi yang pertama kali di lakukan setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah menggantikan birokrasi colonial dengan birokrasi baru. Reformasi ini merupakan hasil kerja perdana Menteri saat itu yang di bantu dengan tenaga ahli dari Amerika

Serikat. Sistem pemerintahan yang di anut presidensial menyebabkan serignya terjadi perubahan system politik sehingga dalam menjalankan peranannya, birokrasi senantiasa mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat dari sabang sampai Merauke termasuk di dalamnya tata kelolah pemerintahan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Pada masa reformasi, tata kelolah pemerintahan dan reormasi birokrasi di Provinsi Papua masih mengadopsi sisitem pemerintahan yang merupakan peninggalan dari sitem birokrasi warisan Orde Baru. Setiap pemimpin yang lahir pada era reformasi melakukan perombakan birokrasi, tetapi tetap belum menyentuh sistem atau watak birokrasi yang menjadi akar masalah yaitu aspek ekonomi, politik dan sosial budaya yang ada di Tanah Papua. Reformasi belum menghasilkan desain besar tentang konsep birokrasi yang mampu menumbuhkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas bagi masyarakat Papua sebagai mana yang di cita – citakan yaitu mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good Gofernance*). Akomodasi berbagai kepentingan politik menjadi pertimbangan utama dalam menguatkan sistem politik presidensial. Pemerintah lebih mengutamakan kompromi (koalisi) dari pada pemanfaatan legitimasi kekuasaan yang kuat dan meyakinkan yang seharusnya dapat di gunakan sebagai modal untuk mengambil prakarsa melakukan reformasi tatal atas birokrasi.¹²

Tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good governance*) di Kabupaten Manokwari sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia terkhususnya elit – elit politik di Kabupaten Manokwari. Kendati masyarakat Papua dan para pejabat pemerintah di Kabupaten Manokwari mereka memahami tentang *good governance* berbeda-beda ,namun setidaknya sebagian besar dari pejabat pemerintah dan daerah membayangkan bahwa dengan *good*

¹² Dr.H.Encup Supriatna,M.S.i “*Perekembangan Politik dan SIstem Birokrasi di Beberpa Negara*” Pustaka Setia Bandung 2015.,Hal.35

governance akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Papua di Manokwari akan menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat. *Good governance* di Kabupaten Manokwari pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari secara bersama dengan masyarakat. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan.

Demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. *Good governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005). Atas dasar tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, adapun lokasi prioritas yang dipilih yaitu Kantor Distrik Okhika dikarenakan peneliti telah mengamati pada wilayah tersebut dan teridentifikasi bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sejauh ini cenderung masih belum optimal pada instansi tersebut.¹³

¹³ Santrio Kamaluddin, "tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada kantor distrik okhika kabupaten pegunungan bintang" *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, Vo.3 No.1 (2019)

Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah “good governance”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih arti (interchangeable), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” dipersamakan dengan istilah “good governance”. Nomenklatur “good governance” merupakan istilah yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama baik dalam tataran internasional maupun nasional. Dalam tataran internasional istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 1992. Sejak saat itu, hampir seluruh negara di dunia yang memiliki hubungan erat dengan Bank Dunia, termasuk pula Indonesia harus menerima konsep “good governance” sebagai pola untuk menjalankan pemerintahan untuk diterapkan di Indonesia (walaupun dengan implementasi yang berbeda-beda pada tiap negara). Paling tidak pada saat itu, diterimanya konsep ini sebagai salah satu prasyarat bagi sebuah negara untuk dapat dipertimbangkan untuk mendapat bantuan dari bank dunia. Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistik semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia. Hubungan ini diyakini bersifat “mutualisme” dan saling melengkapi. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan dapat terwujud tanpa terlaksananya penegakan¹⁴

¹⁴ Meri Yarni1 Latifah Amir,” penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilar penegakan hak asasi manusia di Indonesia”*Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2012.